

Analisis pusat pertumbuhan dan sektor ekonomi dalam mengurangi ketimpangan pendapatan

Vera Vevalemsa Sitepu^{1✉}, Farida Rahmawati²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri, Malang.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wilayah pusat pertumbuhan serta bagaimana interaksinya dengan wilayah hinterland. Selain itu untuk mengetahui sektor ekonomi unggulan pada tiap kabupaten/kota. Objek dalam penelitian ini yaitu kabupaten/kota yang membentuk Provinsi DIY. Data yang digunakan adalah data sekunder tahun 2016-2020 yang bersumber dari publikasi BPS dan instansi lainnya. Terdapat lima alat analisis kuantitatif yang digunakan untuk menjawab penelitian ini. Untuk menentukan pusat pertumbuhan digunakan analisis skalogram sedangkan untuk mengetahui interaksinya dengan wilayah hinterland digunakan analisis gravitasi. Sektor unggulan pada tiap wilayah kabupaten/kota diketahui dengan menggunakan analisis Shift Share, SLQ dan DLQ yang kemudian di overlay. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah yang dapat mempertahankan dirinya sebagai pusat pertumbuhan dalam lima tahun terakhir adalah Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta. Pada tahun 2017, Kabupaten Bantul sebagai wilayah hinterland memiliki interaksi tertinggi dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo sebagai wilayah hinterland memiliki interaksi tertinggi dengan Kabupaten Sleman. Sedangkan pada tahun 2020, Kabupaten Kulon Progo sebagai wilayah hinterland memiliki interaksi tertinggi dengan Kabupaten Sleman. Lalu, terdapat sektor unggulan pada tiap kabupaten/kota kecuali Kabupaten Bantul.

Kata kunci: Ketimpangan pendapatan; statistic location quotient; sektor unggulan; pusat pertumbuhan; hinterland

Analysis of growth centers and economic sectors in reducing income inequality

Abstract

This study aims to determine the growth center area and how it interacts with the hinterland area. In addition to knowing the leading economic sector in each district / city. The object of this research is the regency/city that forms the DIY Province. The data used is secondary data for 2016-2020 which is sourced from the publications of BPS and other agencies. There are five quantitative analysis tools used to answer this research. To determine the growth center, scalogram analysis is used, while to determine its interaction with the hinterland area, gravity analysis is used. The leading sectors in each district/city are identified by using the analysis of Shift Share, SLQ and DLQ which are then overlaid. The results of the study show that the areas that have been able to maintain themselves as growth centers in the last five years are Sleman Regency, Gunung Kidul Regency, and Yogyakarta City. In 2017, Bantul Regency as a hinterland region had the highest interaction with Yogyakarta City and Kulon Progo Regency as a hinterland region had the highest interaction with Sleman Regency. Meanwhile, in 2020, Kulon Progo Regency as a hinterland region has the highest interaction with Sleman Regency. Then, there are leading sectors in each district/city except for Bantul Regency.

Key words: Income inequality; statistical location quotient; leading sector; growth center; hinterland

PENDAHULUAN

Tiap negara baik itu negara maju dan berkembang memiliki keberhasilan dan hambatan yang berbeda dalam usaha pembangunan. Semakin terbukanya pasar dunia saat ini menyebabkan tingkat persaingan dalam pembangunan antar negara menjadi semakin luas dan berat (Wahyudin, 2005). Untuk meningkatkan daya saing nasional, suatu negara harus memiliki keselarasan antara faktor fundamental (sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian) dan faktor infrastruktur sekunder (sistem keuangan, persaingan organisasi pasar dan lingkungan, dan manajemen korporat) (Grevtsev, 2009).

Dalam persaingan global saat ini, Indonesia sebagai negara berkembang memiliki permasalahan dalam mengelola sumber daya dan meningkatkan daya saingnya. Salah satu strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan mengubah sumber daya - ekspor menjadi sumber daya - inovasi, dimana perubahan tersebut tentunya membutuhkan jangka waktu yang panjang namun akan memungkinkan untuk meningkatkan daya saing dan inovasi dalam rantai teknologi (Grevtsev, 2009). Dalam survei World Competitiveness Yearbook yang diselenggarakan oleh Institute Management Development pada tahun 2021 menyatakan bahwa Indonesia menduduki urutan 37 dari 64 negara dalam daya saing, urutan ini sedikit mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 yaitu di urutan 40. Upaya Indonesia untuk menjadi negara yang berdaya saing tentunya diperoleh atas kontribusi dari wilayah tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang juga berdaya saing (Puspita et al., 2017).

Tingkat daya saing suatu wilayah dapat tergambarkan dari kontribusinya terhadap PDRB. Untuk meningkatkan tingkat PDRB, tentunya harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, kualitas SDM, kegiatan ekonomi yang produktif, dan lapangan pekerjaan yang luas dan heterogen. Adapun hal tersebut untuk mengurangi masalah kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, kualitas pendidikan dan kesehatan serta kriminalitas (Todaro & Smith, 2006). Namun tak semua wilayah memiliki kondisi atau kemampuan yang sama, sehingga tingkat daya saing dan PDRB antar wilayah pun turut berbeda.

Salah satu wilayah tingkat provinsi di Indonesia yang laju PDRB-nya mampu menyeimbangi bahkan melebihi pertumbuhan ekonomi nasional adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara administratif, terdapat empat kabupaten dan satu kota yang membentuk provinsi ini dengan luas wilayah sebesar 3.133,15 km². Adapun persentase luas wilayah DIY terhadap Indonesia hanya sebesar 0,17 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY jika dibandingkan dengan PDB Indonesia dari tahun 2016-2020 disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1.
Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi DIY dan PDB Indonesia Tahun 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
Provinsi DIY	5,05	5,26	6,20	6,59	-2,69	4,08
Indonesia	5,03	5,07	5,17	5,02	2,07	3,64

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi DIY mengalami tren positif dan selalu melebihi pertumbuhan nasional, kecuali tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Jika dirata-rata, laju pertumbuhan ekonomi DIY melebihi nasional dengan selisih 0,44 persen. Laju pertumbuhan ekonomi DIY yang terbilang baik ini ternyata belum mampu menyelesaikan masalah ketimpangan pendapatan, artinya tingkat kesejahteraan antar penduduk provinsi DIY belum merata. Hal ini terbukti dari laporan BPS yang menyatakan bahwa indeks gini provinsi DIY merupakan yang tertinggi dibanding provinsi lainnya serta melebihi indeks gini nasional dalam lima tahun terakhir. Adapun perbandingan rata-rata indeks gini dan laju pertumbuhan PDRB tahun 2016-2020 pada tiap kabupaten/kota di Provinsi DIY disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.
Rata-rata Indeks Gini dan Laju Pertumbuhan PDRB Pada Kabupaten/Kota
Provinsi DIY dan Indonesia Tahun 2016-2020

Kabupaten/kota	Rata-rata Indeks Gini	Rata-rata Laju PDRB (%)
Kabupaten Kulon Progo	0,374	6,20
Kabupaten Bantul	0,42	3,90
Kabupaten Gunungkidul	0,338	3,94
Kabupaten Sleman	0,414	3,02
Kota Yogyakarta	0,422	3,87
Provinsi DIY	0,428	4,08
Indonesia	0,387	3,64

Kemajuan dalam proses globalisasi melalui keterbukaan pasar berkontribusi secara signifikan meningkatkan ketimpangan ekonomi antar wilayah (Ezcurra & Del Villar, 2021). Dari tabel 2 diatas, rata-rata ketimpangan pendapatan tertinggi terjadi di kota Yogyakarta yang merupakan ibu kota Provinsi dengan keadaan lebih maju dibanding wilayah lainnya. Hal ini sejalan dengan sebuah penelitian yang menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan cenderung terjadi pada daerah yang merupakan sentra ekonomi dengan keadaan yang lebih maju (Castells-Quintana et al., 2015).

Untuk mengurangi masalah ketimpangan pendapatan pada Provinsi DIY, perlulah tiap pemerintah kabupaten/kota mengetahui sektor unggulannya sebagai kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar kesejahteraan antar penduduk dapat lebih merata dan dengan harapan menjadi wilayah yang berdaya saing pula. Selain itu, pemerintah Provinsi DIY juga harus mengetahui pusat pertumbuhan serta interaksi antara kabupaten/kota pembentuknya agar pembangunan daerah yang berhasil lebih cepat tercapai (Priyadi & Atmadji, 2017). Wilayah sebagai pusat pertumbuhan dapat terlihat dari fasilitas-fasilitas yang tersedia di dalam wilayahnya, semakin banyak fasilitas maka wilayah tersebut layak dijadikan pusat pertumbuhan. Wilayah pusat pertumbuhan dan wilayah pendukung (hinterland) memiliki hubungan yang positif, jika pusat pertumbuhan mengalami kemajuan maka akan mempengaruhi ke wilayah pendukungnya. (Frisdiantara & Mukhlis, 2016)

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan dengan tujuan agar pemerintah Provinsi DIY mengetahui wilayah pusat pertumbuhan dan interaksinya terhadap wilayah hinterland sebagai poin penting agar pemerintah lebih terfokus dalam memprioritaskan pembangunan di wilayah pusat pertumbuhan, dimana hal tersebut juga akan merangsang pertumbuhan ekonomi pada wilayah hinterland. Selain itu, dengan diketahuinya sektor unggulan pada tiap kabupaten/kota menjadi kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga tingkat kesejahteraan penduduk pun dapat lebih merata. Sehingga dengan diketahuinya dua hal tersebut, masalah terkait ketimpangan pendapatan dapat berkurang serta pembangunan lebih seimbang dan efisien pada Provinsi DIY di masa yang akan datang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS Provinsi DIY dan BPS dari masing-masing kabupaten/kota yang membentuk Provinsi DIY. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan lima teknik analisis kuantitatif sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. Objek dalam penelitian ini akan mengidentifikasi pusat pertumbuhan dan masing-masing interaksinya terhadap wilayah hinterland serta sektor unggulan pada tiap wilayah di Provinsi DIY.

Analisis Pusat Pertumbuhan dan Interaksinya Terhadap Wilayah Hinterland

Analisis Skalogram

Semakin banyak atau lengkap fasilitas yang terdapat di suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah setaranya menandakan bahwa wilayah tersebut merupakan pusat pertumbuhan. Sedangkan wilayah yang fasilitasnya kurang lengkap disebut sebagai wilayah pendukung (hinterland). Melalui analisis skalogram, dapat diketahui kabupaten/kota yang merupakan pusat pertumbuhan di Provinsi DIY jika dilihat dari fasilitas berupa sarana dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan tempat ibadah (Priyadi & Atmadji, 2017). Terdapat tiga langkah dalam menentukan pusat pertumbuhan melalui analisis ini.

Mencari banyak kelas pada tiap kabupaten/kota

$$K = 1 + 3,3 \log n$$

K adalah jumlah kelas, sedangkan n adalah jumlah objek penelitian

Menentukan interval atau jarak kelas

$$\text{Interval} = \frac{X - Y}{K}$$

X adalah jumlah fasilitas tertinggi, Y adalah jumlah fasilitas terendah, dan K adalah jumlah kelas.

Uji kelayakan analisis dengan perhitungan COR (Coefficient of Reproducibility)

Jika nilai COR sebesar 0,9 – 1, artinya penelitian dengan analisis skalogram ini dikatakan layak.

$$COR = 1 - \frac{\sum e}{N \times n}$$

$\sum e$ adalah jumlah kesalahan, N adalah jumlah fasilitas, dan n adalah jumlah objek penelitian.

Analisis Gravitasi

Dalam mengetahui besarnya daya tarik suatu wilayah atas potensinya serta kaitan potensi tersebut dengan wilayah lainnya maka dapat dianalisis dengan menggunakan analisis gravitasi (Utoyo, 2007). Untuk mencari angka interaksi antara pusat pertumbuhan dan wilayah hinterland, rumus yang digunakan yaitu sebagai berikut.

$$G_{ij} = k \frac{N_i \times N_j}{d_{ij}^b}$$

G_{ij} adalah besarnya interaksi wilayah i dengan wilayah j, N_i adalah jumlah penduduk di wilayah i, N_j adalah jumlah penduduk di wilayah j, d_{ij} adalah jarak antara wilayah i dan j (km), b adalah pangkat dari d_{ij} dimana $b=2$, dan k adalah angka konstanta empiris yang bernilai 1.

Analisis Sektor Unggulan

Shift Share

Untuk melihat pergeseran ekonomi atau laju pertumbuhan struktur ekonomi wilayah analisis terhadap pergeseran atau laju pertumbuhan ekonomi wilayah acuan dapat digunakan analisis shift share (Basuki & Mujiraharjo, 2017). Analisis ini sendiri terdiri atas tiga komponen pendukung analisa yakni pertumbuhan ekonomi nasional (national growth effect/national share), pengaruh bauran industri (industry mix share/proposional share), dan pergeseran differential share. Berikut merupakan formula untuk menghitung Shift share secara keseluruhan.

$$G_{ij} = NS_{ij} + PS_{ij} + DS_{ij}$$

Statistic Location Quotient (SLQ)

SLQ (Statistic Location Quotient) sebagai teknik analisis pertumbuhan ekonomi digunakan untuk membandingkan pertumbuhan sektor ekonomi saat ini antara dua wilayah yaitu pada suatu wilayah dalam lingkup kecil dengan wilayah yang lebih besar/nasional (Tarigan, 2014). Tujuan dari analisis ini yakni untuk mengidentifikasi sektor basis yang diukur dari seberapa besar kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian. Dari hasil inilah kemudian akan diketahui kemampuan suatu wilayah, apakah net importir atau net eksporter. Berikut merupakan formula untuk menghitung LQ.

$$SLQ = \frac{S_i / S}{N_i / n}$$

S_i adalah PDRB sektor i wilayah analisis, sedangkan S adalah total PDRB wilayah analisis. N_i adalah PDRB sektor i wilayah acuan, sedangkan N adalah total PDRB wilayah acuan.

Dinamic Location Quotient (DLQ)

Teknik ini digunakan untuk membandingkan pertumbuhan dan laju sektor ekonomi antara dua lingkup wilayah kecil dan besar untuk melihat reposisi sektor di masa yang datang, apakah sektor tetap bertahan sebagai sektor basis/non basis atau yang sebelumnya basis menjadi non-basis dan begitupun sebaliknya. Manfaat dari analisis ini yaitu membantu pemerintah dalam mengetahui potensi sektor yang akan dijadikan prioritas untuk dikembangkan (Sihombing, 2018).

$$DLQ = \frac{1 + g_{ik}) / (1 + G_k}{(1G_{ip}) / (1 + G_p)}$$

G_{ik} adalah laju pertumbuhan sektor i di wilayah analisis, sedangkan G_k adalah rata-rata laju pertumbuhan sektor di wilayah analisis. G_{tp} adalah laju pertumbuhan sektor i di wilayah acuan, sedangkan G_p adalah rata-rata laju pertumbuhan sektor di wilayah acuan dan t adalah selisih tahun akhir dan tahun awal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pusat Pertumbuhan dan Interaksinya Terhadap Wilayah Hinterland Analisis Skalogram

Pada perhitungan analisis skalogram ini menggunakan dua puluh jenis fasilitas yang terdiri dari lima bidang berbeda yaitu pendidikan, kesehatan, ibadah, ekonomi, dan pemerintahan. Fasilitas-fasilitas yang ada pada tiap kabupaten/kota tersebut kemudian diakumulasi dengan memberikan angka “1” jika fasilitas tersebut tersedia dan angka “0” jika fasilitas tersebut tidak tersedia pada tiap wilayah. Wilayah yang berada pada tingkatan kelas I adalah wilayah yang memiliki jumlah unit fasilitas terlengkap sehingga layak dijadikan pusat pertumbuhan. Sedangkan wilayah yang termasuk pada tingkatan kelas II atau III (hinterland), memiliki jumlah unit fasilitas yang terbilang belum cukup lengkap sehingga belum layak dijadikan sebagai pusat pertumbuhan.

Tabel 3.

Hasil Analisis Skalogram Antar Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2016-2020

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Yogyakarta	Kelas I (2896) (417.744)	Kelas I (2878) (422.732)	Kelas I (2697) (427.498)	Kelas I (2730) (431.939)	Kelas I (2741) (435.936)
Kabupaten Bantul	Kelas I (5055) (983.527)	Kelas III (5041) (995.264)	Kelas III (5064) (1.006.692)	Kelas I (5324) (1.018.402)	Kelas I (5331) (1.029.997)
Kabupaten Kulon Progo	Kelas III (4082) (416.683)	Kelas III (4104) (421.295)	Kelas III (3935) (425.758)	Kelas III (3972) (430.220)	Kelas III (4007) (434.483)
Kabupaten Gunung Kidul	Kelas I (6063) (722.479)	Kelas I (6150) (729.364)	Kelas I (6186) (736.210)	Kelas I (6349) (742.731)	Kelas I (6316) (749.274)
Kabupaten Sleman	Kelas I (6625) (1.180.479)	Kelas I (6500) (1.193.512)	Kelas I (6562) (1.206.714)	Kelas I (6662) (1.219.640)	Kelas I (6660) (1.232.598)

() = Jumlah Unit Fasilitas, () = Jumlah Penduduk

Dari tabel kesimpulan analisis skalogram diatas, terdapat tiga kabupaten/kota yang termasuk kelas I dan layak dijadikan sebagai pusat pertumbuhan kedepannya karena selama lima tahun terakhir mampu untuk mempertahankan fasilitasnya dengan baik. Pusat pertumbuhan pertama yaitu kabupaten Sleman dengan 20 jenis fasilitas (6.660 unit fasilitas) dan jumlah penduduk sebesar 1.232.598 jiwa. Kabupaten Sleman adalah wilayah dengan tingkat perekonomian tertinggi dan memiliki jumlah penduduk terpadat dibanding wilayah lainnya.

Lokasinya pun strategis serta dikembangkan sebagai wilayah pusat pariwisata, kebudayaan, pendidikan serta pengembangan industri kecil dan jasa. Banyak investor asing yang menanamkan modalnya karena wilayah ini memiliki peluang sebagai lahan bisnis yang didukung oleh sarana dan prasarana yang lengkap juga wilayah yang tidak sepi pengunjung atau konsumen sehingga kabupaten Sleman merupakan sentra ekonomi di Provinsi DIY yang sangat berkembang.

Kedua yaitu kabupaten Gunung Kidul dengan 20 jenis fasilitas (6.316 unit fasilitas) dan dengan jumlah penduduk sebesar 749.274. Kabupaten Gunung Kidul merupakan wilayah terluas di Provinsi DIY yang memiliki potensi dalam sektor primer dan sekunder. Selain itu, wilayah ini berpotensi sebagai tempat pariwisata dengan mengandalkan pantainya yang luas di bagian selatan. Terakhir yaitu Kota Yogyakarta dengan 20 jenis fasilitas (3.528 unit fasilitas) dan jumlah penduduk sebesar 435.936 jiwa. Wilayah ini merupakan pusat pemerintahan sekaligus pusat pariwisata yang didominasi oleh pemukiman masyarakat urban. Wilayah ini dikenal sebagai pusat bisnis karena dikenal sebagai kota pariwisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain itu, kota ini juga memiliki iklim investasi yang kondusif dan dijadikan sebagai perlintasan utama yang menghubungkan kota-kota di sekitarnya.

Analisis Gravitasi

Tabel 4.

Hasil Analisis Gravitasi antara Pusat Pertumbuhan dan Hinterland Tahun 2017

Kabupaten / Kota Asal	Kabupaten / Kota Tujuan	Penduduk daerah asal	Penduduk daerah Tujuan	Jarak i - j	(Jarak i - j) ^b	Angka Interaksi
(i)	(j)	(Pi)	(Pj)	(dij)/k m	(dij) ²	(Aij)
Kabupaten Sleman	Kabupaten Bantul	1.193.512	995.264	25	625	1.900.575.243
	Kabupaten Kulon Progo	1.193.512	421.295	33	1089	461.726.940
Kabupaten Gunung Kidul	Kabupaten Bantul	729.364	995.264	40	1600	453.693.582
	Kabupaten Kulon Progo	729.364	421.295	76,7	5882,89	52.232.390
Kota Yogyakarta	Kabupaten Bantul	422.732	995.264	12	144	2.921.735.703
	Kabupaten Kulon Progo	422.732	421.295	30	900	197.883.198

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2017, kabupaten Bantul memiliki nilai interaksi tertinggi terhadap kota Yogyakarta sebesar 2.921.735.703 dan kabupaten Kulon Progo memiliki nilai interaksi tertinggi terhadap kabupaten Sleman sebesar 461.726.940.

Tabel 5.

Hasil Interaksi Wilayah antara Pusat Pertumbuhan dan Hinterland Tahun 2020

Kabupaten/Kota Asal	Kabupaten /Kota Tujuan	Penduduk daerah asal	Penduduk daerah Tujuan	Jarak i – j	(Jarak i – j) ²	Angka Interaksi
(i)	(j)	(Pi)	(Pj)	(dij)/km	(dij) ²	(Aij)
Kabupaten Sleman	Kabupaten Kulon Progo	1.232.598	434.483	33	1089	491.774.909
Kabupaten Gunung Kidul	Kabupaten Kulon Progo	749.274	434.483	76,7	5882,89	55.337.906
Kabupaten Bantul	Kabupaten Kulon Progo	1.029.997	434.483	34	1156	387.124.728
Kota Yogyakarta	Kabupaten Kulon Progo	435.936	434.483	30	900	210.451.979

Tabel diatas menunjukkan bahwa kabupaten Kulon Progo memiliki nilai interaksi tertinggi dengan kabupaten Sleman sebesar 491.774.909. Perbandingan hasil analisis gravitasi antar wilayah tahun 2017 dan 2020 mengalami perubahan nilai interaksi. Kabupaten Bantul mengalami reposisi menjadi pusat pertumbuhan dari yang sebelumnya adalah wilayah hinterland. Sedangkan kabupaten Kulon Progo tak pernah mengalami reposisi menjadi pusat pertumbuhan dan selalu menjadi wilayah hinterland selama lima tahun berturut-turut.

Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Pada Tiap Kabupaten/Kota di Provinsi DIY

Dari hasil overlay atas analisis Shift Share, SLQ dan DLQ (+++) menunjukkan bahwa sektor unggulan di tiap kabupaten/kota Provinsi DIY pada tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut. Kabupaten Kulon Progo

Tabel 6.

Hasil Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Kulon Progo

Sektor	Teknik Analisis			Overlay
	SLQ	DLQ	SS	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	+	-	-	-
Pertambangan dan Penggalan	+	+	+	+++
Industri Pengolahan	-	-	+	-
Pengadaan Listrik dan Gas	-	-	-	-
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	+	-	+	-
Konstruksi	+	+	+	+++
Perdagangan, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	+	-	+	-
Transportasi dan Pergudangan	+	-	-	-
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-	+	-	-
Informasi dan Komunikasi	-	-	+	-
Jasa Keuangan dan Asuransi	-	-	-	-
Real Estate	-	-	+	-
Jasa Perusahaan	-	+	+	-
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	+	-	-	-
Jasa Pendidikan	-	-	+	-
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	+	-
Jasa Lainnya	+	-	-	-

Tabel diatas menunjukkan bahwa kabupaten Kulon Progo hanya memiliki dua sektor unggulan dengan kriteria sektor basis, prospektif, dan pertumbuhan cepat. Sektor tersebut antara lain sektor pertambangan dan penggalan serta konstruksi. Kedua sektor unggulan ini masing-masing merupakan sektor primer dan sekunder yang saling berhubungan karena berkaitan dengan proyek pembangunan. Salah satu mega proyek pembangunan yang ada di wilayah ini adalah Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) yang kemudian dilanjutkan dengan pembangunan tol untuk menghubungkan bandara dengan kota Yogyakarta. Selain itu terdapat proyek Bedah Menoreh sebagai penghubung antara bandara dengan Candi Borobudur. Atas kontribusi sektor konstruksi terhadap PDRB Kulon Progo sebesar 13,8 persen dalam proyek pembangunan tentunya berpengaruh terhadap peningkatan kontribusi sektor pertambangan dan penggalan yang juga memberikan multiplier effect karena terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat (Radhi & Hariningsih, 2017).

Kabupaten Bantul

Tabel 7.
Hasil Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Bantul

Sektor	Teknik Analisis			Overlay
	SLQ	DLQ	SS	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	+	+	-	-
Pertambangan dan Penggalian	+	-	-	-
Industri Pengolahan	+	+	-	-
Pengadaan Listrik dan Gas	+	+	-	-
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur-Ulang		+	+	-
Konstruksi	-	-	-	-
Perdagangan, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	+	+	-	-
Transportasi dan Pergudangan	-	+	-	-
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	+	+	-	-
Informasi dan Komunikasi	-	+	+	-
Jasa Keuangan dan Asuransi	-	+	+	-
Real Estate	-	+	+	-
Jasa Perusahaan	-	+	-	-
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	-	+	-	-
Jasa Pendidikan	-	+	+	-
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	+	+	-
Jasa Lainnya	-	+	-	-

Tabel diatas menunjukkan bahwa tidak terdapat sektor unggulan setelah seluruh teknik analisis di overlay pada kabupaten Bantul. Secara akumulasi dari tahun 2016-2020, sektor yang menyumbang pendapatan tertinggi terhadap PDRB Kabupaten Bantul adalah sektor industri pengolahan serta pertanian, kehutanan, dan perikanan dimana masing-masing menyumbang sebesar 14,8 persen dan 11,5 persen. Sektor industri menjadi salah satu sektor yang pendapatannya tinggi karena semakin semaraknya industri kreatif kabupaten Bantul dalam produk buatan yang mampu menembus pasar lokal maupun internasional. Berbagai macam industri yang terdapat pada wilayah ini menjadi penyumbang terbesar dibanding wilayah lainnya dalam kerajinan produk provinsi DIY yaitu sebesar 70 persen (DPMPTSP, 2020). Selain itu, juga memiliki potensi sumber daya wilayah pesisir bagian selatan atas enam pantai yang dijadikan sebagai mata pencaharian oleh masyarakat dalam perikanan tangkap.

Kabupaten Gunung Kidul

Tabel 8.
Hasil Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Gunung Kidul

Sektor	Teknik Analisis			Overlay
	SLQ	DLQ	SS	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	+	+	-	-
Pertambangan dan Penggalian	+	-	-	-
Industri Pengolahan	-	+	-	-
Pengadaan Listrik dan Gas	-	+	-	-
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	+	+	+	+++
Konstruksi	-	-	-	-
Perdagangan, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	+	+	-	-
Transportasi dan Pergudangan	-	+	-	-
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-	+	-	-
Informasi dan Komunikasi	-	+	+	-
Jasa Keuangan dan Asuransi	-	-	-	-
Real Estate	-	+	+	-
Jasa Perusahaan	-	+	-	-
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	+	+	-	-
Jasa Pendidikan	-	+	+	-
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	+	+	-
Jasa Lainnya	+	+	-	-

Tabel diatas menunjukkan bahwa kabupaten Gunung Kidul hanya memiliki satu sektor unggulan dengan kriteria sektor basis, prospektif, dan pertumbuhan cepat. Sektor tersebut yaitu sektor pengadaan air; pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. Kabupaten Gunung Kidul merupakan wilayah terluas di provinsi DIY dengan persentase sebesar 46,63 persen. Pada wilayah ini banyak dijumpai perairan yang dimanfaatkan sebagai mata pencarian oleh masyarakat karena adanya 60 pantai yang dapat dijadikan peluang untuk menarik wisatawan nusantara dan mancanegara. Selain itu, adanya budidaya perikanan air tawar pada kampung-kampung dijadikan sebagai pembangunan partisipatif berbasis kearifan lokal oleh pemerintah.

Kabupaten Sleman

Tabel 9.
Hasil Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Sleman

Sektor	Teknik Analisis			Overlay
	SLQ	DLQ	SS	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	-	-	-
Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-
Industri Pengolahan	+	+	-	-
Pengadaan Listrik dan Gas	-	+	-	-
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-	-	+	-
Konstruksi	+	-	-	-
Perdagangan, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-	+	-	-
Transportasi dan Pergudangan	+	-	-	-
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	+	-	-	-
Informasi dan Komunikasi	-	+	+	-
Jasa Keuangan dan Asuransi	-	+	+	-
Real Estate	+	+	+	+++
Jasa Perusahaan	+	+	-	-
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	-	+	-	-
Jasa Pendidikan	+	+	+	+++
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	+	+	-
Jasa Lainnya	-	-	-	-

Tabel diatas menunjukkan bahwa kabupaten Sleman memiliki dua sektor unggulan dengan kriteria sektor basis, prospektif, dan pertumbuhan cepat. Sektor tersebut antara lain real estate dan jasa pendidikan. Kedua sektor ini termasuk dalam kategori sektor tersier yang terus mengalami tren positif dalam pertumbuhannya. Kontribusi sektor real estate yang terus meningkat salah satunya disebabkan oleh semakin meningkatnya harga tanah karena permintaan semakin meningkat dari pebisnis yang berlomba-lomba untuk mendirikan bisnis properti. Selain itu, Gamping menjadi salah wilayah di kabupaten Sleman yang dijadikan simpang atau overpass dalam pembangunan jalan tol Solo-Jogja sepanjang 96,57 kilometer sehingga akan semakin menciptakan peluang baru dalam bisnis properti atau real estate di wilayah ini. Sedangkan sektor pendidikan sebagai sektor unggulan karena wilayah ini merupakan pusat pendidikan yang didukung oleh universitas terbaik di Indonesia yang kemudian mampu menciptakan IPM dengan nilai konstan selama 10 tahun terakhir pada kategori sangat tinggi ($IPM \geq 80$).

Kota Yogyakarta

Tabel 10.
Hasil Analisis Sektor Unggulan Kota Yogyakarta

Sektor	Teknik Analisis			Overlay
	SLQ	DLQ	SS	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	-	-	-
Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-
Industri Pengolahan	+	-	-	-
Pengadaan Listrik dan Gas	+	-	-	-
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur+ Ulang		-	+	-
Konstruksi	-	-	-	-
Perdagangan, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-	-	-	-
Transportasi dan Pergudangan	-	+	-	-
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	+	-	-	-
Informasi dan Komunikasi	+	+	+	+++
Jasa Keuangan dan Asuransi	-	+	+	+++
Real Estate	+	-	+	-
Jasa Perusahaan	+	-	-	-
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	+	+	-	-
Jasa Pendidikan	+	+	+	+++
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	+	+	+	+++
Jasa Lainnya	+	-	-	-

Tabel diatas menunjukkan bahwa kota Yogyakarta memiliki empat sektor unggulan dengan kriteria sektor basis, prospektif, dan pertumbuhan cepat. Sektor tersebut antara lain sektor informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; jasa pendidikan; dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Keempat sektor unggulan tersebut termasuk dalam kategori sektor tersier, dimana wilayah ini dikenal sebagai kota pariwisata yang condong didominasi oleh berbagai jenis sub-sektor jasa yang ada. Selain karena dikenal sebagai kota pariwisata, banyaknya investor yang berinvestasi pada sektor jasa dengan ekspektasi tingkat keuntungan (*expected rate of return*) yang tinggi berpengaruh terhadap tingginya pendapatan sektor-sektor jasa tersebut. Kota ini juga dikenal sebagai kota pendidikan dengan kualitas SDM yang baik dengan IPM sebesar 86,61 pada tahun 2020 sehingga dapat menjadi aset bagi pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya.

SIMPULAN

Diketahuinya pusat pertumbuhan menjadi preferensi bagi pemerintah provinsi DIY untuk lebih fokus pada pembangunan di pusat pertumbuhan dengan harapan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di wilayah hinterland. Growth pole merupakan salah satu konsep pertumbuhan ekonomi yang layak untuk diterapkan pada provinsi DIY. Hal ini karena menurut Perroux dalam Tarigan (2004), secara geografis pusat pertumbuhan dapat ditentukan berdasarkan banyaknya fasilitas dan kemudahan masyarakat dalam mengaksesnya sedangkan secara fungsional pusat pertumbuhan merupakan wilayah yang sifatnya dinamis sehingga mampu mendorong aktivitas ekonomi, baik itu bagi wilayahnya sendiri maupun wilayah yang lebih rendah. Sehingga pada konsep pertumbuhan growth pole ini, keberadaan wilayah pusat pertumbuhan akan menyebarkan dampak positif pada wilayah hinterland (trickle down effect) karena adanya interaksi antara pusat pertumbuhan dan wilayah hinterland.

Dari hasil penelitian ini, wilayah pusat pertumbuhan meliputi Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta. Pada peraturan daerah Provinsi DIY No.5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah menyatakan bahwa Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta termasuk dalam wilayah Pusat Kegiatan Nasional (PKN), sedangkan Kabupaten Gunung Kidul termasuk wilayah Pusat Kegiatan Lokal (PKW). Selain itu, diketahuinya sektor unggulan pada tiap kabupaten/kota dapat menjadi prioritas bagi tiap wilayah untuk mengembangkan sektor tersebut dengan tetap memperhatikan perkembangan pada sektor lainnya agar pertumbuhan ekonomi dapat semakin meningkat. Adapun dalam penelitian ini didapatkan bahwa aktivitas ekonomi provinsi DIY lebih mengandalkan sektor tersier yang bergerak di bidang jasa karena provinsi ini merupakan pusat budaya, pariwisata, dan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi D.I Yogyakarta. (2021). Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2021.
- Basuki, M., & Mujiraharjo, F. N. (2017). Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Sleman dengan Metode Shift Share dan Location Quotient. *Jurnal Sains, Teknologi Dan Industri*, 15(1), 52–60. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/sitekin>
- Castells-Quintana, D., Ramos, R., & Royuela, V. (2015). Income inequality in European Regions: Recent trends and determinants. *Review of Regional Research*, 35(2), 123–146. <https://doi.org/10.1007/s10037-015-0098-4>
- Ezcurra, R., & Del Villar, A. (2021). Globalization and spatial inequality: Does economic integration affect regional disparities? *Annals of Regional Science*, 67(2), 335–358. <https://doi.org/10.1007/s00168-021-01050-5>
- Frisdiantara, C., & Mukhlis, I. (2016). *Ekonomi Pembangunan Sebuah Kajian Teoritis dan Empiris*. Lembaga Penerbitan Universitas Kanjuruhan Malang.
- Grevtsev, A. A. (2009). Estimation of a country's economic development on the basis of the global competitiveness index. *Studies on Russian Economic Development*, 20(6), 655–662. <https://doi.org/10.1134/S1075700709060112>
- Mohamad Wahyudin. (2005). *Perekonomian Indonesia Deskripsi, Preskripsi, dan Kebijakan*. Bayumedia Publishing.
- Priyadi, U., & Atmadji, E. (2017). Identifikasi Pusat Pertumbuhan Dan Wilayah Hinterland Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Ajie*, 2(2), 193–219. <https://doi.org/10.20885/ajie.vol2.iss2.art9>
- Puspita, C. W., Rachmawati, F., & Sumarsono, H. (2017). Strategi Peningkatan Daya Saing Daerah. *Jurnal Pendidikan*, 2(3), 392–399.

- Radhi, F., & Hariningsih, E. (2017). Kontribusi Sektor Unggulan Terhadap Produk Domestik Bruto Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Bisnis Teori Dan Implementasi*, 8(1), 19–35. <https://doi.org/10.18196/bti.81080>
- Sihombing, F. N. (2018). Identifikasi Pangan Unggulan Di Kota Medan : Location Quotient Dan Dynamic Location Quotient. *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 6(2), 91–94.
- Statistik, B. P. (2021). Statistik Indonesia 2021. Badan Pusat Statistik Indonesia. <https://www.bps.go.id/publication/2021/02/26/938316574c78772f27e9b477/statistik-indonesia-2021.html>
- Tarigan, R. (2004). Perencanaan Pembangunan Wilayah. PT BUMI AKSARA.
- Tarigan, R. (2014). Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi (Edisi Revi). PT BUMI AKSARA.
- Terpadu, D. P. M. dan P. (2020). Sektor Ekonomi Kreatif Kabupaten Bantul. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu. https://dpmpt.bantulkab.go.id/web/potensi_investasi/detail/24-sektor-perindustrian-dan-ekonomi-kreatif
- Todaro, & Smith. (2006). Pembangunan Ekonomi. Erlangga.
- Utoyo, B. (2007). Membuka Cakrawala Dunia. PT. Setia Purna Inves.